



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055
Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

LAMPIRAN I

TABEL KINERJA

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran : 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,19	I	96,19
					II	96,19
					III	96,19
					IV	96,19*)
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,35 - 71,50	I	70,35 - 71,50
					II	70,35 - 71,50
					III	70,35 - 71,50
					IV	70,35 - 71,50 *)
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	65	I	65
					II	65
					III	65
					IV	65*)
		Total Fertility Rate (TFR)	Orang	1,55	I	1,55
					II	1,55
					III	1,55
					IV	1,55*)
1.1	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	62	I	62
					II	62
					III	62
					IV	62*)
1.2	Meningkatnya pemenuhan dan	Rasio kekerasan terhadap	Angka	26	I	26
					II	26
					III	26

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perlindungan terhadap perempuan dan anak	perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			IV	26*)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	3,93	I	3,93
					II	3,93
					III	3,93
					IV	3,93*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.. 232.829.600,00
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.. 543.525.674,00
3.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.. 176.943.480,00
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.. 628.231.440,00
5.	Program Pengendalian Penduduk	Rp.. 42.250.000,00
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.. 5.587.920.292,00
7.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.. 219.247.500,00
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.. 5.936.155.657,76
Jumlah Anggaran		Rp. 13.367.103.643,76

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2026

Tujuan :

“Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas”

Uraian Tujuan :

Yang dimaksud dalam Tujuan kinerja **“Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas”** adalah sebuah tujuan atau visi yang ingin dicapai dalam konteks pembangunan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan ini ingin mencapai kesetaraan gender, melindungi perempuan dan anak, serta menciptakan keluarga yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul .
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Tujuan kinerja ini memiliki 4 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam	IPG = $\frac{IPM \text{ Laki-Laki}}{IPM \text{ Perempuan}} \times 100$	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		pembangunan manusia. Dengan demikian, IPG menjadi alat penting untuk memantau dan meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia.		
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelikan. Dengan demikian, IPA menjadi alat penting untuk memantau dan meningkatkan perlindungan anak di Kabupaten Bantul.	IPA = Rata-rata tertimbang dari semua indikator perlindungan anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan keluarga di Indonesia. iBangga menjadi alat penting untuk memantau dan meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Bantul.	iBangga = Rata-rata tertimbang dari tiga aspek utama kualitas keluarga	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun) jika dia mengalami tingkat kesuburan yang	TFR = Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur	Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		sama dengan tingkat kesuburan yang ada pada saat itu.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,19	Angka capaian IPG terakhir dirilis oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2024 dengan nilai 96,05 sedangkan data capaian 2025 belum tersedia. Perhitungan target 2026 akan disesuaikan dengan capaian memperhitungkan capaian 2025 pada perjanjian kinerja perubahan
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,35 - 71,50	Angka capaian IPA terakhir dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 dengan nilai 70,30 sedangkan data capaian 2024 dan 2025 belum tersedia. Perhitungan target 2026 akan disesuaikan dengan capaian memperhitungkan capaian 2025 pada perjanjian kinerja perubahan
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tahun 2026 pada dokumen RPJMD adalah 65 sedangkan realisasi Tahun 2025 adalah 64,5.
Total Fertility Rate (TFR)	1,55	Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2026 pada dokumen RPJMD adalah 1,55 sedangkan realisasi Tahun 2025 adalah 1,54.

Uraian Sasaran 1 :

“Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender”

Yang dimaksud dengan **“Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender”** berarti adanya upaya untuk Meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender berarti adanya peningkatan kemampuan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam proses pembangunan yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Ini mencakup berbagai aspek, seperti: pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan berbasis kesetaraan gender. Dengan meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera bagi semua.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul .
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk menjadi subjek dan objek dalam proses pembangunan. IPBK menjadi penting dalam	Rata -rata geometrik dari 20 indikator yang berasal dari Kemenkes dan BPS	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		menilai keberhasilan pembangunan yang ada di Kabupaten Bantul tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keterlibatan penduduk dalam proses tersebut.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	62	Target indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Tahun 2026 pada dokumen RPJMD adalah 62 sedangkan realisasi Tahun 2025 adalah 61,7.

Uraian Sasaran 2 :

“Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak”

Yang dimaksud dengan **“Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak”** adalah meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak berarti adanya peningkatan upaya untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan perempuan dan anak, serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, penindasan, dan eksploitasi. Dengan meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera bagi semua.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul .

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Orang) per 100.000 penduduk perempuan adalah sebuah indikator untuk mengukur jumlah perempuan yang mengalami kekerasan, termasuk perdagangan manusia, relatif terhadap jumlah penduduk perempuan. Indikator ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) dibagi Jumlah total penduduk perempuan dikali 100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kejadian kekerasan terhadap anak di suatu wilayah. Rasio ini dihitung berdasarkan jumlah kasus kekerasan anak per 10.000 anak di wilayah tersebut.	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi Jumlah total penduduk anak dikali 10.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	26	Target tersebut sesuai dengan dokumen cascading RPJMD Tahun 2025-2029. Target 2026 adalah 26 sedangkan realisasi Tahun 2025 adalah 28.
Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	3,93	Target tersebut sesuai dengan dokumen cascading RPJMD Tahun 2025-2029. Target 2026 adalah 3,93 sedangkan realisasi Tahun 2025 adalah 4,06.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

PIHAK KEDUA
KEPALA

Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002


YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
NIP. 197402261993031001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	81,75	I	-
					II	-
					III	-
					IV	81,75 *)
		Indekss Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	92	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.936.155.657
	Jumlah Anggaran	Rp 5.936.155.657

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA

Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
NIP. 197402261993031001



Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

SEPTI WULANDARI, S.E
NIP. 198306082006042005

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	I	-
					II	-
					III	-
					IV	7 *)
2	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	I	-
					II	-
					III	-
					IV	5 *)
3	Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	I	-
					II	-
					III	-
					IV	32 *)
4	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
5	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	22	I	-
					II	-
					III	-
					IV	22 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp	114.862.500
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	:	Rp	108.862.500
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp	6.000.000
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	:	Rp	5.366.506.918
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	:	Rp	5.229.946.918
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	:	Rp	130.560.000
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	:	Rp	6.000.000

Jumlah Anggaran : Rp 5.481.369.418

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS


YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
NIP. 197402261993031001

Bantul, 07 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN


SEPTI WULANDARI, S.E
NIP. 198306082006042005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055
Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTI WULANDARI, S.E
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
NIP. 197402261993031001


SEPTI WULANDARI, S.E
NIP. 198306082006042005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	I	-
					II	-
					III	-
					IV	11 *)
2	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
3	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
4	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
5	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
6	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	81	I	-
					II	-
					III	-
					IV	81 *)
8	Dokumen Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	19	I	-
					II	-
					III	-
					IV	19 *)

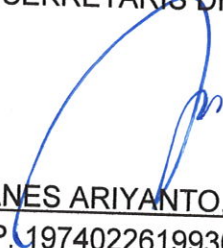
Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Administrasi Umum Perangkat Daerah	:	Rp	82.684.853
1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	34.369.853
2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	Rp	44.715.000
3) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	:	Rp	3.600.000
B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp	241.686.786
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	Rp	30.793.800
2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	21265.000
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	Rp	189.627.986
C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp	130.414.600
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	:	Rp	105.560.500
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	:	Rp	24.854.100
Jumlah Anggaran	:	Rp	454.786.239

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS


YOHANES ARIYANTO, S.E., M.P
NIP. 197402261993031001

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


SEPTI WULANDARI, S.E
NIP. 198306082006042005



P2P

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTIKA CAHYANI, S.H., M.Hum
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KARTIKA CAHYANI, S.H., M.Hum
NIP. 197005271991022001

PIHAK KEDUA
KEPALA

Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	Persen	18	I	-
					II	-
					III	-
					IV	18 *)
2.	Terlaksananya Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
A.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 232.829.600
B.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 543.525.674
	Jumlah Anggaran	Rp 776.355.274

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 07 Januari 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH

NIP. 196603201996032002

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, positioned above the name of the first party.

KARTIKA CAHYANI, S.H., M.Hum

NIP. 197005271991022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Tersusunnya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
2	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/ Profesi/ Dunia Usaha/ Media yang Diadvokasi dan Didampingi Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Lembaga	55	I	-
					II	-
					III	-
					IV	55 *)
3	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Yang Mendapatkan Pendampingan	Terlaksananya Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	I	-
					II	-
					III	-
					IV	20 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	16.350.000
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	16.350.000
B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	204.179.600
1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	:	Rp	204.179.600
C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	12.300.000
1) Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	12.300.000
Jumlah Anggaran :			Rp 232.829.600

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN



KARTIKA CAHYANI, S.H, M. Hum
NIP. 197005271991022001

Bantul, 07 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



LILIS WIJAYANTI, S.Sos, MM
NIP. 196904171990032006



Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

SIGIT JATMIKA ARI WIBOWO, S.Tr.Gz
NIP. 198511282010011012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dalam Pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
					II	-
					III	-
					IV	1 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan : Rp 228.507.764
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dalam Pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota : Rp 228.507.764

Jumlah Anggaran : Rp 228.507.764

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN



KARTIKA CAHYANI, S.H, M. Hum
NIP. 197005271991022001

PIHAK PERTAMA
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



SIGIT JATMIKA ARI WIBOWO, S.Tr.Gz
NIP. 198511282010011012



P2HIP
UPTD

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

PIHAK KEDUA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH

NIP. 196603201996032002

SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.

NIP. 196908071999032003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	66,43	I	-
					II	-
					III	-
					IV	66,43 *)
2.	Terlaksananya Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	80,16	I	-
					II	-
					III	-
					IV	80,16 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
A.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 176.943.480
B.	Program: Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 628.231.440
	Jumlah Anggaran	Rp 805.174.920

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

PIHAK KEDUA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002



SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.
NIP. 196908071999032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENGGANIS SEKAR WANANDHI, S.Psi
Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ANAK

SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.
NIP. 196908071999032003

PIHAK PERTAMA
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RENGGANIS SEKAR WANANDHI, S.Psi
NIP. 199210282020122013

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	75	I	-
					II	-
					III	-
					IV	75 *)
2	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Bimtek	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota)	Orang	60	I	-
					II	-
					III	-
					IV	60 *)
3	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Pendampingan	Terlaksananya Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	10	I	-
					II	-
					III	-
					IV	10 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	4.500.000
1) Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	4.500.000
B. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	19.725.000
1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	8.700.000
2) Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	:	Rp	11.025.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	24.225.000

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ANAK



SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.
NIP. 196908071999032003

PIHAK PERTAMA
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



RENGGANIS SEKAR WANANDHI, S.Psi
NIP. 199210282020122013



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZZAKIYAH FITRIYATI, S.Pd

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ANAK

SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.
NIP. 196908071999032003

PIHAK PERTAMA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

AZZAKIYAH FITRIYATI, S.Pd
NIP. 197310261993032001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
2	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota : Rp 152.718.480

1) Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota : Rp 152.718.480

B. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia : Rp 205.440.000
Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1) Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia : Rp 205.440.000
Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran : Rp 358.158.480

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ANAK



SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.
NIP. 196908071999032003

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



AZZAKIYAH FITRIYATI, S.Pd
NIP. 197310261993032001



P24A
H1

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos

Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003

PIHAK KEDUA
KEPALA

Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Lembaga Yang Menyediakan Layanan Rujukan	Lembaga	10	I	-
					II	-
					III	-
					IV	10 *)
2.	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Layanan Perlindungan Khusus Korban Kekerasan Anak	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Anggaran
A.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp 315.017.910
B.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 422.791.440
	Jumlah Anggaran	Rp 737.809.350

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHOIRUL REZA DEANI, SH
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Pertama
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

PIHAK PERTAMA
PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA

SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003

CHOIRUL REZA DEANI, SH
NIP. 199201232019022003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pendampingan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pendampingan Korban Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	160	I	-
					II	-
					III	-
					IV	160 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Layanan Pendampingan Korban Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota : Rp 422.791.440

Jumlah Anggaran : Rp 422.791.440

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK



SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003

Bantul, 07 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA



CHOIRUL REZA DEANI, SH
NIP. 199201232019022003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATRI ANDINI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PPA

RATRI ANDINI, S.Sos
NIP. 198204072010012019

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	145	I	-
					II	-
					III	-
					IV	145 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota : Rp 315.017.910

1) Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota : Rp 315.017.910

Jumlah Anggaran : Rp 315.017.910

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PPA



SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos
NIP. 196908071999032003



RATRI ANDINI, S.Sos
NIP. 198204072010012019



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055
Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. SUPRABANDARI
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PIBAK KEDUA
KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PEMERIKSAAN PERSEMPUN
DAN PERUBAHAN
PENGENDALAN
DAN KELUARAN BEBERAPA

[Signature]

Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)	Angka	7,18	I	-
					II	-
					III	-
					IV	7,18 *)
2.	Terlaksananya Program Keluarga Berencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	Persen	65,25	I	-
					II	-
					III	-
					IV	65,25 *)
3.		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	19,25	I	-
					II	-
					III	-
					IV	19,25 *)
4.		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	1,09	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1,09 *)
5.	Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Kelompok Tribina	Persen	85,5	I	-
					II	-
					III	-
					IV	85,5 *)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	89,1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	89,1 *)
7.		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	73,7	I	-
					II	-
					III	-
					IV	73,7*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
A.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 42.250.000
B.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5.587.920.292
C.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 219.247.500
	Jumlah Anggaran	Rp 5.849.417.792

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISTIAJI NUGROHO, A. Md. Kep
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. SUPRABANDARI
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007

PIHAK PERTAMA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

RISTIAJI NUGROHO, A. Md. Kep
NIP. 198204092005011005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
2	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	30	I	-
					II	-
					III	-
					IV	30 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

1) Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang : Rp 98.861.646

**B. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB) : Rp 245.321.000**

1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan : Rp 245.321.000
(IMP)

Jumlah Anggaran : Rp 344.182.646

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007

PIHAK PERTAMA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA



RISTIAJI NUGROHO, A. Md. Kep
NIP. 198204092005011005



Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

NIP. 197303191999032003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda

Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kegiatan	12	I	-
					II	-
					III	-
					IV	12 *)
2	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) Melalui Sistem Informasi Keluarga	Dokumen	3	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3 *)
3	Jumlah Laporan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	12	I	-
					II	-
					III	-
					IV	12 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	:	Rp	13.260.000
1) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	:	Rp	22.050.000
B. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	20.200.000
1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) Melalui Sistem Informasi Keluarga	:	Rp	20.200.000
C. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	:	Rp	219.247.500
1) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	:	Rp	219.247.500
Jumlah Anggaran			Rp 261.497.500

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

PIHAK PERTAMA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA



dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007



SRI WULANDARI, A.Md
NIP. 197303191999032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUSRINI AGUSTINA PRIHATINI, S. Psi

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. SUPRABANDARI

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

PIHAK PERTAMA
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007

BUSRINI AGUSTINA PRIHATINI, S. Psi
NIP. 198901302022032001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Laporan	12	I	-
					II	-
					III	-
					IV	12 *)
2	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	900	I	-
					II	-
					III	-
					IV	900 *)
3	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Terlaksananya Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1 *)
4	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Laporan	25	I	-
					II	-
					III	-
					IV	25 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		: Rp	5.243.737.646
1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	:	Rp	98.861.646
2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	:	Rp	4.926.876.000
3) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	:	Rp	173.000.000
4) Peningkatan Kesertaan KB Pria	:	Rp	45.000.000
Jumlah Anggaran		: Rp	5.243.737.646

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



dr. SUPRABANDARI
NIP.197107102002122007

Bantul, 07 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



BUSRINI AGUSTINA PRIHATINI, S. Psi
NIP. 198901302022032001